**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG DIPLOMASI**

* 1. **Pengertian Diplomasi**

Diplomasi merupakan salah satu praktek dalam Hubungan internasional antar negara melalui perwakilan-perwakilan resmi. Praktek diplomasi dapat meliputi keseluruhan proses hubungan luar negeri dan formasi kebijakan. Disebutkan bahwa diplomasi juga diartikan alat atau mekanisme kebijakan luar negeri yang dijadikan sebagai tujuan akhir, juga diartikan sebagai teknik-teknik operasional yang akan dilakukan oleh sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingannya melalui hukum.[[1]](#footnote-2)

Kegiatan diplomasi berkaitan erat dengan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam hubunganya dengan negara lain karena diplomasi merupakan suatu tahapan dalam menjalankan politk luar negeri suatu negara. Dalam mempelajari diplomasi pada umumnya harus ditinjau hubungan antar negara dan politik luar negerinya, sehingga hubungan diplomasi dan politik luar negeri suatu negara mempunyai interelasi yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa yang mencangkup beberapa hal yakni :

* Menentukan dan mempergunakan semua daya atau kemampuan manusia untuk mencapai tujuan;
* Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional, sesuai dengan kemampuan dan tenaga yang ada;
* Menentukan apakah tujuan nasional sejalan dengan kepentingan bangsa atau negara lain;
* Mempergunakan sarana dan kesempatan dengan sebaik-baiknya.[[2]](#footnote-3)

Dasar dari diplomasi adalah komunikasi yaitu pemikiran dan ide-ide yang berasal dari berbagai negara. Tujuan utama suatu negara mengadakan hubungan diplomasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara lain, menjaga hubungan dengan negara lain, dan menjaga keserasian antar negara. Dalam diplomasi tingkat tinggi, dilakukan pertahapan yang biasanya dilakukan oleh aktor negara yang diwakili oleh para kepala negara yang dilakukan secara langsung dalam sebuah forum diskusi dengan aktivitas berupa penukaran ide/gagasan. Namun seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam perkembanganya maka secara umum hubungan diplomatik saat ini dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui tahapan yakni pengiriman utusan berupa duta ataupun perwakilan-perwakilan yang dikirim oleh negaranya.

Diplomasi dijadikan sebagai instrumen utama dari kebijakan politik suatu negara, yang menjadi badan utama yang menjalankan tingkah laku masyarakat internasional. Diplomasi biasanya dilakukan dalam bentuk negosiasi antar negara yang merupakan cara mudah untuk menyelesaikan persaingan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dapat dikatakan bahwa diplomasi sebagai metode sederhana untuk menciptakan penyelesaian konflik secara damai.

Diplomasi berjalan melalui departemen-departemen atau kementrian-kementrian luar negeri, kedutaan-kedutaan besar, legasi-legasi, konsulat-konsulat dan misi-misi khusus di seluruh dunia. Diplomasi dapat meliputi berbagai macam kepentingan mulai dari hal yang sederhana dalam hubungan antar dua negara sampai masalah-masalah vital seperti perang dan perdamaian. Jika diplomasi gagal maka akan muncul suatu krisis yang mengarah pada bahaya perang.[[3]](#footnote-4)

* 1. **Sejarah Diplomasi**

Secara etiomlogi, istilah diploma berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dapat diartikan sebagai surat kepercayaan. Perkataan diplomasi kemudian menjelma menjadi istilah diplomati, diplomasi, dan diplomatik.[[4]](#footnote-5) Herman F. Eilts dalam bukunya, “*Diplomacy-Contemporary Practice*” mengatakan bahwa diplomasi adalah seni atau ilmu yang harus dilakukan sehubungan dengan transaksi urusan-urusan antara negara-negara berdaulat dengan menggunakan sarana agen-agen terekstradisi (diakui) dan menurut hukum internasional; diplomasi merupakan metode atau prosedur yang diterapkan dalam manajemen negosiasi internasional.[[5]](#footnote-6) Secara sederhana, diplomasi bisa didefinisikan sebagai proses politik yang denganya entitas politik, umumnya negara, melakukan hubungan-hubungan luar negeri satu sama lain dalam lingkungan internasional.[[6]](#footnote-7)

Dilacak dari asal usulnya, diplomasi dimulai pada zaman kuno. Orang Cina, India, Mesir, dan Mesopotamia pada ratusan tahun sebelum Masehi telah mengirimkan dan menerima utusan dari dan ke negara lain yang bertugas untuk merancang perdamaian dan berusaha menyelesaikan perselisihan.[[7]](#footnote-8) Di Barat, diplomasi modern dimulai di abad kedua belas atau tiga belas ketika penguasa-penguasa wilayah mengirim utusan kepada penguasa lainnya. Para utusan ini bertugas menyampaikan pandangan penguasa yang mengutusnya dan berunding dan membuat kesepakatan atas nama majikannya dengan penguasa setempat.

Perkembangan diplomasi di abad empat belas atau lima belas dimana negara-negara kecil Italia mulai mengirim utusan-utusan yang menetap di luar negeri. Praktik ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain yang berdaulat dan dijadikan model standar di Eropa. Tujuan menetapnya utusan-utusan tersebut adalah agar mereka bisa memonitior kejadian di negara lain tersebut secara terus menerus demi kepentingan negara asal. Perkembangan berikutnya terjadi karena adanya kongres Wina 1815. Saat itu para negarawan sadar akan perlunya mengatur hubungan diplomatik di antara negara-negara Eropa. Lalu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1948 Komisi Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat rancangan konvensi diplomatik yang mengatur tugas dan tanggung jawab korps diplomatik.[[8]](#footnote-9)

Dalam sejarahnya, diplomasi memiliki banyak metode dalam pelaksanaannya. Namun, terdapat dua yang paling dikenal adalah Metode Perancis (diplomasi lama/tradisional) dan Metode Amerika (diplomasi baru). Metode Perancis adalah teori dan praktik negosiasi internasional yang dicetuskan oleh Richeliu, dianalisis oleh Callieres dan dipraktikkan oleh semua negara Eropa selama tiga abad sebelum perang dunia pertama. Ada lima hal yang menjadi karakteristik diplomasi tradisional ini, diantaranya:

* Eropa dianggap sebagai wilayah yang paling penting di dunia
* Asumsi bahwa negara-negara dengan kekuatan besar lebih baik dibanding negara-negara kecil, karena mereka memiliki kepentingan dan tanggung jawab lebih besar, memiliki lebih banyak uang dan tentunya senjata
* Negara-negara dengan kekuatan besar memiliki tanggung jawab bersama terhadap perilaku negara-negara kecil dan preservasi perdamaian diantara mereka.
* Keberadaan pelayanan diplomasi professional yang seragam di seluruh negara Eropa. Mereka mewakili pemerintahnya di ibukota negara lain dan memiliki standar pendidikan yang sama, perjalanan dan tujuan yang sama pula.
* Aturan yang menjelaskan negosiasi harus bersifat rahasia (*confidential*).

Diplomasi baru (*new diplomacy*) pada sisi yang lain mulai berkembang pada perang dunia pertama, yang oleh Harold Nicolson disebut sebagai Diplomasi Metode Amerika. Karakteristik diplomasi baru ini mencakup beberapa hal, yaitu terdiri atas diplomasi parlementer yang dipraktikkan di organisasi internasional (Liga Bangsa-Bangsa), diplomasi personal para pemimpin politik, dan diplomasi terbuka. Diplomasi baru ini disebut juga diplomasi demokratis yang digambarkan dengan peningkatan respons pada rakyat, berkurangnya rahasia pemerintah, dan kontrol legislatif yang lebih besar.

Perkembangan dalam metode diplomasi diatas disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, perubahan substansial pada komposisi negara-negara didunia. Pada abad XIX hanya sedikit negara yang termasuk dalam komunitas diplomatik dan kebanyakan berada di Eropa, Amerika, dan Asia dimana hanya Jepang dan Cina yang lebih menonjol. Ketika memasuki abad XX banyak negara-negara yang baru merdeka dan menjadi anggota komunitas internasional. *Kedua*, peningkatan kepentingan dan perhatian antar negara dalam hal perdagangan internasional, kemajuan ilmu pengetahuan, dan interaksi antarnegara di bidang budaya, ekonomi, sosial, dan keuangan. *Ketiga*, revolusi dalam bidang teknologi transportasi dan komunikasi. *Keempat*, perubahan dalam proses diplomasi. Dimana setelah Perang Dunia II, proses diplomasi juga dimaksudkan untuk mempromosikan ideologi dan konflik sehingga para diplomat dapat menjadi wakil ideologi, agen spionase, dan para subversif. *Kelima*, munculnya persepsi yang lebih demokratis tentang hubungan internasional dengan partisipasi rakyat secara langsung maupun tidak langsung dalam kepentingan nasional, bukan hanya dipercayakan oleh segelintir elit tertentu. *Terakhir*, meningkatkan posisi Amerika Serikat dalam dunia internasional setelah Perang Dunia II.[[9]](#footnote-10) Hingga kini, diplomasi baru atau model Amerika masih dianggap yang paling relevan dalam pelaksanaannya.

Berkembangnya diplomasi melahirkan aturan-aturan mengenai praktikpraktik hubungan diplomatik dan hubungan internasional lainnya seperti Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diolomatik beserta protokol-protokol pilihan, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler beserta protokol-protokol pilihan, Konvensi New York 1969 mengenai Misi Khusus beserta protocol-protokol pilihan, Konvensi New York 1973 mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap orang-orang yang menurut Hukum Internasional dilindungi, termasuk para diplomat, Konvensi Wina 1975 mengenai Keterwakilan Negara dalam Hubungannya dengan Organisasi Internasional yang bersifat Universal.

* 1. **Konsep Perkembangan Diplomasi**

Jika dianalisis berdasarkan periode dan ciri diplomasi dalam hubungan antar negara, maka diplomasi memiliki perkembangan yang cukup unik dan berpengaruh terhadap karakter diplomasi. Sebagai contoh analisis diplomasi ini, dapat dimulai dari tinjauan berdasarkan periode keberlakukan praktek diplomasi. Periode diplomasi demokratis menandai transisi dari diplomasi lama pada periode pertama dan kedua dengan diplomasi baru.

Era diplomasi lama mengacu pada periode berkisar sejak munculnya sistem negara bangsa sampai pada Perang Dunia I. Untuk memperoleh tujuan yang lebih besar, negara kadang-kadang menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan sesungguhnya tetapi jarang menjadi ancaman nyata. Diplomasi lama atau tradisional mencirikan semangat kompromi. Keberhasilan diplomasi lama yang terbesar adalah keberhasilan negosiasi dalam kongres wakil lima Negara besar yaitu Austria, Rusia, Prussia, Inggris, dan Perancis pada Kongres Wina tahun 1815 yang bersepakat untuk

mengakhiri perbedaan di antara mereka.[[10]](#footnote-11)

Sedangkan diplomasi demokratis, menurut Wilson bahwa diplomasi baru atau diplomasi terbuka, mengandung tiga gagasan yaitu harus tidak ada perjanjian rahasia negosiasi harus dilakukan secara terbuka, dan apabila suatu perjanjian sudah dicapai, tak boleh ada usaha di belakang layar untuk mengubah ketetapannya secara rahasia.

.

Menurut Nicolson perkembangan teori diplomasi dalam negara-negara demokratis bersumber dari konsepsi hak-hak nasional secara eksklusif kearah konsepsi kepentingan internasional bersama, yaitu;

“***I have already stated that the development of diplomatic theory in democratic states has been from the conception of exclusive national rights towards a conception of common international interest****.”*[[11]](#footnote-12)

Faktor besar kedua dalam perkembangan teori diplomasi selama abad sembilan belas adalah kebangkitan pentingnya opini publik. Dikemukakan Palmerston bahwa opini lebih kuat dari tentara. Opini publik yang didasarkan kepada kebenaran dan keadilan akan berhasil melawan bayonet infantri, tembakan artileri dan serangan kavaleri. Sedangkan faktor ketiga adalah perkembangan sistem komunikasi sehingga dengan penemuan mesin uap, telegraf, pesawat terbang, dan telepon telah banyak mengubah praktek-praktek diplomasi lama.[[12]](#footnote-13)

Perkembangan sejarah penyelenggaraan diplomasi dikemukakan pula oleh Brian White bahwa diplomasi dapat dibedakan dari tingkatan tradisional ke tingkatan yang baru, dari perang dingin dan setelah perang dingin. Perbedaan pengertian diplomasi tradisional (*traditional diplomacy*) dengan diplomasi baru (*new diplomacy*) serta diplomasi perang dingin (*cold war diplomacy*) dengan diplomasi setelah perang dingin (*post cold war diplomacy*) ditinjau melalui struktur, proses, dan agendanya.[[13]](#footnote-14)

Diplomasi tradisional memiliki struktur yang menempatkan Negara sebagai pusat kegiatan. Pejabat diplomatik bertindak atas nama negara yang kemudian menjadi suatu institusi bahkan menjadi suatu profesi. Mengenai prosesnya, diplomasi diorganisasikan secara luas dalam hubungan bilateral dan biasanya dilaksanakan secara rahasia. Sejak abad ke-15 diplomasi menjadi bukan hanya proses yang teratur tetapi proses yang diatur dan agendanya sempit serta tentu saja dengan membandingkan periode sebelumnya. Kepentingan yang kuat dari diplomasi direfleksikan oleh kekuatan kepentingan pimpinan politiknya.

Demikian juga halnya dengan Diplomasi Baru, timbul karena kegagalan Diplomasi Tradisional untuk mencegah perang dunia pertama sehingga meluaskan keyakinan bahwa bentuk baru diplomasi dibutuhkan. Diplomasi Baru timbul dari dua gagasan penting yaitu diplomasi sebaiknya lebih membuka pengawasan serta penelitian publik, dan pentingnya membangun organisasi internasional yang bermula dari Liga Bangsa Bangsa yang dibentuk setelah perang dunia pertama.[[14]](#footnote-15)

. Jika dianalisis berdasarkan strukturnya maka struktur Diplomasi Baru tetap hampir sama dengan Diplomasi Tradisional yang menempatkan Negara dan pemerintahan sebagai aktor utama dalam system Internasional. Namun terdapat dua perubahan penting yang perlu diperhatikan, sebab mempunyai implikasi bukan hanya terhadap struktur tetapi juga terhadap proses. Pertama, negara tidak lagi menjadi satu satunya aktor yang terlibat. Negara harus membagi masalah internasional seperti organisasi internasional yang juga terlibat dalam diplomasi. Organisasi Internasional terdiri dari dua tipe yaitu antar pemerintah dengan anggota, dan wakil-wakil pemerintah, dan non-pemerintah dengan anggota secara individual dan kelompok.

Kedua, mulai mengubah terminologi lingkup kegiatan dan memperluas ketentuan-ketentuan yang menyangkut kehidupan warga negara. Mereka mempunyai kepedulian yang lebih luas dari semula hanya untuk keamanan fisik kepada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Perubahan kepentingan dari negara sebagai actor internasional dan pertumbuhan sejumlah aktor non-negara yang terlibat dalam perubahan ciri-ciri karakteristik Diplomasi Baru, sebagai sebuah proses dalam negosiasi. Dengan demikian kajian diplomasi sebagai suatu kegiatan yang kompleks, yang melibatkan aktor yang berbeda, sangat nyata dalam menunjukkan arah perkembangannya.[[15]](#footnote-16)

Berdasarkan perspektif agenda diplomasi selanjutnya maka seiring dengan perkembangan dan kepentingan antar negara, berkembanglah sebuah paradigma diplomasi baru. Diplomasi baru ini berisi sejumlah isu baru dan juga memperkuat kembali pengamanan secara militer. Penghindaran perang menjadi prioritas, bahwa Diplomasi Baru mengusahakan Perang Dunia Pertama sebagai akhir dari seluruh perang. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, keterbatasan Diplomasi Baru menjadi terlihat. Sekalipun demikian karakteristik-karakteristik dalam Diplomasi Baru terus berlanjut dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua, seperti multilateralisme dan bertambahnya agenda khusus yang menyangkut isu tentang lingkungan hidup, teknologi dan pengawasan persenjataan.[[16]](#footnote-17)

Berakhirnya Perang Dunia Kedua menurut Hamilton dan Langhorne mengukuhkan pelajaran bagi bangsa di Eropa bahwa tidak ada perbedaan antara politik internasional dan ekonomi internasional. Bertambahnya jumlah permasalahan dibidang industri, sosial dan teknologi dipersepsikan memiliki dimensi internasional dan oleh karena itu juga memiliki dimensi diplomasi. Sebagaimana halnya perang dalam abad ke-20, diplomasi menjadi total dalam sasarannya dan masalah pokoknya. Istilah menurut Chester B. Bowles yang dikutip Hamilton : “***we are coming to realize that foreign operations in today's world call for a total diplomacy ...****“*[[17]](#footnote-18)

Lebih jauh lagi White mendefinisikan diplomasi ; “***...as a key process of communication and negotiation in world politics and as an important foreign policy instrument used by global actors.***” [[18]](#footnote-19)

* 1. **Pola-Pola Diplomasi**

Diplomasi merupakan salah satu aspek paling penting bagi aktor hubungan internasional dalam mencapai kepentingannya. Apabila diteliti lebih lanjut, diplomasi sendiri memiliki beberapa pola berbeda yang masing-masing pola tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pola diplomasi tersebut terbagi menjadi ke dalam enam pola, yaitu:

1. **Diplomasi Bilateral**

Diplomasi bilateral seringkali diartikan sebagai hubungan dua pihak dalam hubungan internasional yang mengacu pada hubungan dua negara.[[19]](#footnote-20) Pola diplomasi bilateral muncul sebelum pecahnya Perang Dunia I, namun dalam praktiknya dianggap terlalu kompleks sehingga dampak untuk terjadinya perang sangat memungkinkan. Pola diplomasi ini dilaksanakan untuk menyatukan satu tujuan dan kepentingan yang sama di antara kedua aktor. Evans dan Newnham (1998) juga menambahkan bahwasanya pola diplomasi bilateral merupakan suatu pola diplomasi yang dilakukan oleh dua negara dalam hubungan internasional secara tertutup atau rahasia. Hal ini dikarenakan diplomasi yang dilakukan hanya seputar kepentingan nasional kedua negara saja, sehingga kecil kemungkinan bagi negara lain untuk ikut berperan aktif dalam diplomasi ini. Diplomasi bilateral biasanya menggunakan prinsip hubungan timbal balik, jadi ketika suatu negara membutuhkan bantuan dari negara lain maka di lain hari ia juga akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan.

Diplomasi bilateral seringkali disebut sebagai pola diplomasi yang paling efektif, mengingat hanya melibatkan dua negara yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Pola ini juga dianggap memiliki fleksibilitas yang besar dan dapat memudahkan pencapaian kompromi.[[20]](#footnote-21) Namun di samping itu, diplomasi bilateral juga memiliki beberapa kekurangan. Roy berpendapat bahwa diplomasi bilateral dapat mengundang kecurigaan bahwa terdapat sesuatu yang disembunyikan oleh salah satu pihak negara. Selain itu, pola diplomasi ini juga bisa bersifat menekan disebabkan adanya pihak yang lebih tinggi.[[21]](#footnote-22) Hal ini dapat diartikan bahwa negara yang memiliki power lebih kuat dapat menekan negara di bawahnya.

1. **Diplomasi Multilateral**

Freeman Jr menyebutkan bahwa diplomasi multilateral adalah interaksi antara tiga negara atau lebih yang memiliki kepentingan sama.[[22]](#footnote-23) Apabila menilik ke masa lalu, pola diplomasi multilateral berkembang sejak abad ke-4 SM mengingat telah terbentuknya suatu aliansi di antara negara-negara Greco-Persian. Lalu pola diplomasi ini kembali muncul ke permukaan pada awal abad ke-20 ketika adanya rasa kekecewaan negara dalam berhubungan melalui sistem diplomasi bilateral. Dalam perjanjian bilateral seringkali ditemukan imbalance of power antara negara kuat dengan negara lemah, yang berujung pada berbedanya kapabilitas tiap negara dalam mencapai kepentingannya saat berdiplomasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pola diplomasi multilateral muncul sebagai jawaban atas keterbatasaan diplomasi bilateral. Pada era modern ini diplomasi telah mengalami perkembangan yang berdampak pada bertambahnya aktor-aktor internasional. Diplomasi tidak lagi hanya melibatkan dua negara saja, melainkan juga melibatkan lebih dari dua negara bahkan juga organisasi internasional. Hal ini sejalan dengan pemikiran Brian White yang berpendapat bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor lagi yang terlibat dalam proses diplomasi.

Diplomasi multilateral harus dilaksanakan secara terbuka melalui negosiasi agar negara mendapatkan kepercayaan tidak hanya dalam negaranya akan tetapi juga pada lingkungan internasional. Setiap permasalahan yang muncul selalu diselesaikan dengan jalan konsensus. Hal tersebut dapat mempermudah suatu negara untuk menjalin hubungan persahabatan dengan negara lainnya. Dalam diplomasi multilateral ini, keberhasilan dalam negosiasi sangat dapat diwujudkan dan ini menjadi suatu strategi diplomasi yang terbilang cukup efektif.[[23]](#footnote-24) Keunggulan lain dari diplomasi multilateral adalah kemungkinan terciptanya kebijakan yang mendapatkan legitimasi kuat karena mengikutsertakan banyak negara. Namun di samping itu, dalam pola diplomasi multilateral akan selalu ada kecenderungan pada setiap negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga konflik tidak dapat dihindarkan.[[24]](#footnote-25) Diplomasi multilateral juga memiliki kelemahan lain yaitu prosesnya sering berjalan lambat karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodasikan.

1. **Diplomasi Asosiasi**

Diplomasi asosiasi merupakan suatu pola diplomasi yang terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan nasional di antara negara-negara yang menjalin hubungan diplomasi bersama.[[25]](#footnote-26) Pola diplomasi ini pertama kali muncul pada tahun 1970an, dalam suatu pelaksanaan Konferensi tentang Lingkungan Hidup Manusia oleh PBB. Melalui konferensi tersebut, negara-negara peserta memiliki peran dan kuasa untuk mempengaruhi kebijakan dalam negaranya masing-masing yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pola diplomasi asosiasi membentuk sebuah organisasi yang dapat memberikan pengaruh pada negara maupun dunia internasional. Isu-isu yang dibahas tidak hanya menyangkut kepentingan antara beberapa negara namun juga membahas isu-isu internasional. Namun biasanya diplomasi ini terjadi pada negara-negara yang letaknya berdekatan sehingga memungkinkan untuk melakukan diplomasi secara kontinyu. Contohnya seperti ASEAN yang mewadahi negara-negara di Asia Tenggara. Kelebihan dari diplomasi ini, akan memperkuat solidaritas negara-negara regional setempat.

1. **Diplomasi Konferensi**

Diplomasi konferensi merupakan aktivitas berdiplomasi dimana pihak-pihak yang bersangkutan berkumpul dalam suatu konferensi untuk membahas isu-isu tertentu dan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Pola ini merupakan pengembangan dari pola diplomasi multilateral dimana diplomasi berjalan sebatas perjanjian antara lebih dari dua negara, sedangkan pola diplomasi konferensi memiliki wadah yang resmi seperti PBB. Pola diplomasi konferensi ini muncul setelah Perang Dunia I yang diwadahi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian muncul kembali setelah Perang Dunia II yang diwadahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.[[26]](#footnote-27) Alasan diplomasi konferensi tersebut muncul dikarenakan atas terbentuknya organisasi dunia yang resmi, yakni PBB, yang diharapkan mampu menepati perjanjian yang dibuat oleh setiap negara. Pola ini lebih menekankan komunikasi secara lisan atau dengan cara face-to-face. Hasil dari diplomasi konferensi akan berjalan dengan efektif hanya jika mencapai consensus.[[27]](#footnote-28) Diplomasi dalam pola ini berjalan lebih terbuka karena bersifat konferensi.

Sama seperti pola diplomasi lainnya, pola diplomasi konferensi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari diplomasi konferensi yaitu, setiap negara yang tergabung dalam konferensi ini terikat dengan kode etik tertentu, sehingga mereka harus benar-benar mengikuti peraturan dan menepati perjanjian yang telah ditentukan dan kecil kemungkinan bagi sebuah negara untuk melakukan penyelewengan, karena bila melakukan akan dikenakan sanksi.[[28]](#footnote-29) Organisasi internasional seperti PBB yang membawahi banyak negara sebagai anggotanya dapat mengawasi segala bentuk interaksi dan diplomasi yang terjadi antar aktor untuk memastikan agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada tanpa ada indikasi tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin terjadi untuk memenuhi kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. PBB juga dapat bertindak sebagai penengah dan juga sebagai penyelesai masalah. PBB dapat mengirim pasukan perdamaian dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik pada daerah-daerah yang bermasalah dengan persetujuan Dewan Keamanan. Sebagai contoh pada kasus Battle of Mogadishu di Somalia pada tahun 1993 dimana PBB mengirim pasukan yang terdiri dari militer Amerika Serikat dan gabungan pasukan perdamaian PBB. Namun di samping itu, diplomasi konferensi yang dilandaskan pada organisasi internasional seperti PBB juga memiliki beberapa kekurangan. Diantara kekurangannya yaitu tidak menutupnya kemungkinan bila ada sekelompok negara yang lebih dominan, sehingga lebih mementingkan kepentingan kelompok tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kejadian nyata dimana Rusia dan China sebagai anggota Dewan Keamanan PBB memveto resolusi PBB karena tidak sesuai dengan kepentingan mereka pada kasus Suriah.

1. **Diplomasi Personal**

Diplomasi personal dapat dipahami oleh pembaca dengan cara seperti seorang presiden yang berkunjung ke negara lain untuk beberapa urusan negara ataupun urusan pribadinya, diluar pekerjaannya sebagai seorang diplomat, namun pemikirannya dapat mempengaruhi diplomat-diplomat yang ada di negara yang dikunjunginya. Diplomasi personal seringkali diartikan sebagai pola diplomasi yang dilakukan oleh aktor tunggal dalam bentuk pihak perorangan. Pola diplomasi ini tentu saja memiliki kekuatan yang kurang mumpuni dalam mencapai tujuannya, hingga pada akhirnya pola diplomasi personal jarang sekali digunakan.

1. **Diplomasi Puncak (*Summit Diplomacy*)**

Definisi dari diplomasi tingkat tinggi menurut USLegal yaitu salah satu jenis diplomasi konferensi yang digunakan oleh pemerintah internasional dimana kepala negara bertemu tatap muka untuk bernegosiasi secara langsung. Pada tahun 1950,[[29]](#footnote-30) Winston Churchill adalah orang pertama yang mengadakan pertemuan para pemimpin negara-negara yang memiliki power sangat kuat sebagai pertemuan tingkat tinggi. Pembentukan dan pengembangan PBB dengan badan-badan khususnya telah memberi kontribusi pada perluasan dan regularisasi diplomasi tingkat tinggi karena PBB adalah lembaga permanen diplomasi tingkat tinggi. Salah satu contoh yang paling ilustratif dari diplomasi tingkat tinggi yakni perkumpulan komunitas ilmiah dan perwakilan dari organisasi masyarakat umum dengan para diplomat dalam UNFCCC (The United Nations Framework Convention on Climate Change) yang membahas dan mencoba untuk menemukan solusi dari permasalahan perubahan iklim dunia. Kelebihan dari pola diplomasi tingkat tinggi yaitu kuatnya legitimasi dalam kebijakan yang dihasilkan dan kecilnya kemungkinan setiap negara untuk melakukan kecurangan. Namun kekurangan dari pola diplomasi tingkat tinggi yakni prosesnya yang berjalan lambat diakibatkan banyaknya negara-negara besar yang terlibat dalam proses ini.

1. Jack C Plano dan Roy Olton, The International Relations Dictionary, third edition (Santa Barbara: Western Michigan University, 1982), hlm. 24. [↑](#footnote-ref-2)
2. Litbang Deplu (1988), hlm. 33-35. [↑](#footnote-ref-3)
3. Roy L. Samendra, Op.Cit., hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
4. C.S.T Kansil, Modul Hukum Internasional (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 71. [↑](#footnote-ref-5)
5. Elmer Plischke, Modern Diplomacy: The Art and The Artisans (Washington DC: American Enterprise Institute, 1979), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 113. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-8)
8. Elmer Plischke, Op.Cit., hlm. 5-7. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, Op.Cit., hlm.121-122. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sir Harold Nicolson, Diplomacy (Washington: Institute for The Study, 1988), hlm.73-79. [↑](#footnote-ref-11)
11. Roy L. Samendra, Op.Cit., hlm. 36-37. [↑](#footnote-ref-12)
12. Katherine Miller, Communication Theories. Perspective, Processes, and Contexts (United

    States of America: McGraw-Hill, 2002), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-13)
13. Sumaryo Suryo Kusumo, 2004. Praktik Diplomasi (Jakarta: STIH ‘‘IBLAM”, 2004), hlm. 79-85. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., hlm. 99. [↑](#footnote-ref-16)
16. J. Baylis Dan Smith. 2001. The Globalization of Word Politics, an Introduction to International Relations, second edition (Oxford University Press, 2001), hlm. 317-322. [↑](#footnote-ref-17)
17. Keith Hamilton dan Richard Langhorne, The Practice of Diplomacy (London: Routledge, 1995), hlm. 183-187. [↑](#footnote-ref-18)
18. J. Baylis Dan Smith, Op.Cit.,. hlm. 317. [↑](#footnote-ref-19)
19. Evans Graham dan Jeffrey Newnham, Dictionary of International Relation (London: Penguin Books Ltd, 1998), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-20)
20. Djelantik Sukawarsini, Diplomasi antara Teori dan Praktik. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-21)
21. S. L. Roy. 1991. Diplomasi. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 56 [↑](#footnote-ref-22)
22. Freeman Jr., Chas W. (2010). The Diplomat’s Dictionary. Washington D.C.: Institute of Peace Press. Hal 44 [↑](#footnote-ref-23)
23. Djelantik, Sukawarsini. *Op cit*. Hal 12 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid* [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.* Hal 29 [↑](#footnote-ref-26)
26. Roy L. Samendra, Op.Cit., hlm. 67-68. [↑](#footnote-ref-27)
27. Djelantik Sukawarsini, Op.Cit., hlm. 56. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-29)
29. USLegal. (n.d.). Summit Diplomacy Law & Legal Definition [Online]. Tersedia dalam: http://definitions.uslegal.com/s/summit-diplomacy/. [Diakses pada 13 Maret 2017]. [↑](#footnote-ref-30)